



## **OPTIMALISASI PERAN KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT GAYO DALAM MEMBANGUN PERDAMAIAN POSITIF DI ACEH**

**Gani Dwisatria Setiyatwan, Endro Legowo, Bambang Wahyudi**

Damai dan Resolusi Konflik, Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan, Indonesia

### **Abstrak**

Penelitian ini berfokus pada nilai-nilai budaya yang dimiliki masyarakat Gayo sehingga dapat digunakan untuk membangun perdamaian positif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan model studi kasus. Dari ke-13 suku yang mendiami Provinsi Aceh, mayoritas etnis di Aceh adalah Aceh, Gayo dan Alas. Gayo merupakan suku yang cenderung multikultur, yakni terdiri dari banyak etnis dalam satu wilayah. Penelitian ini mengaitkan kearifan lokal yang ada dengan teori konflik, collective memory, serta prinsip mahatma gandhi. Hasil penelitian ini berupa nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung dalam kehidupan sosial masyarakat Gayo sehingga menunjang perdamaian positif di masa depan, diantaranya: mukemel, tertib, setie, munentu, amanah, genap mupakat, dan alang tulong.

**Kata Kunci:** sistem budaya Gayo, potensi konflik, perdamaian positif.

### **PENDAHULUAN**

Aceh adalah sebuah Provinsi yang terletak pada di bagian Barat paling ujung Pulau Sumatera di wilayah Indonesia, dan banyak menyimpan ragam kekayaan budaya, suku, adat dan ragam bahasa. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh, jumlah penduduk Provinsi Aceh berdasarkan hasil sensus penduduk pada

tahun 2020 adalah sekitar 5,27 juta jiwa, meningkat sebesar 1,56% dibanding tahun 2010 (BPS, 2021). Di Aceh terdapat 13 suku dan masing-masing suku memiliki adat, bahasa tersendiri yang berbeda-beda yaitu; Aceh, Gayo, Aneuk Jamee, Singkil, Alas, Tamiang, Kluet, Devayan, Sigulai, Pakpak, Haloban, Lekon, dan Nias (Nurdin, 2019). Penduduk di Provinsi Aceh terdiri atas

---

\*Correspondence Address : [dwisatria.gani@gmail.com](mailto:dwisatria.gani@gmail.com)

DOI : 10.31604/jips.v9i9.2022.3201-3211

© 2022UM-Tapsel Press

beberapa etnik dan ras, sekaligus antara etnik tersebut mempunyai kebudayaan tersendiri yang berbeda. Meski demikian, nuansa Islam terasa sangat mewarnai seluruh kebudayaan masyarakat Aceh. Karena itu tidak salah jika Provinsi Aceh disebut sebagai a multi ethnic moeslim province (Ananta, 2007).

Dari ke-13 suku yang mendiami Provinsi Aceh, mMayoritas etnis di Aceh adalah Aceh, Gayo dan Alas. Masyarakat etnis Aceh mendiami daerah pantai, Suku Gayo dan Alas mendiami dataran tinggi Aceh, Suku Gayo sebelah utara dan Suku Alas di sebelah selatan (Wahyudi, 2013). Kehidupan multikultural di Aceh telah lama terjalin sedemikian rupa sejak interaksi bangsa-bangsa masuk ke Aceh. Adanya interaksi di Aceh menimbulkan adaptasi dan asimilasi menjadi masyarakat yang plural (Wahyudi, 2013).

Pluralisme di Aceh semakin tercermin terutama pada di wilayah Aceh Tengah. Keunikan yang ada pada di Kabupaten Aceh Tengah ini adalah karena jumlah etnis Jawa lebih tinggi dibandingkan dengan etnis Aceh (Sagita, 2016). Menurut T. A. Hasan Husin (1980:16) (dalam Sagita, 2016), orang Jawa untuk pertama kalinya datang dalam jumlah besar ke dataran tinggi Gayo adalah pada masa pemerintahan Hindia Belanda di awal abad ke-20. Mereka dibawa secara berkelompok oleh Pemerintah Hindia Belanda untuk dipekerjakan sebagai buruh, atau yang lebih populer disebut sebagai Jawa Kontrak. Sementara itu jumlah suku Gayo yang tinggal di Aceh Tengah ini masih mendominasi dengan jumlah 60%.

Berbicara soal multikulturalisme, selalu rawan dengan terjadinya konflik. Konflik itu adalah adanya sesuatu yang incompatible dalam masyarakat, misalnya perangkat-perangkat sosial, diskriminasi, dan intoleransi (Muluk, 2021). "Konflik yang ditakutkan orang adalah konflik yang mengundang eskalasi kekerasan yang

masif" (Muluk, 2021). Di dalam konteks Aceh, kekerasan kultural tidak bisa dipisahkan dari kekerasan struktural. Artinya, kekerasan politik juga menggiring kepada kekerasan yang terjadi karena perbedaan etnis, agama dan bahasa (Sagita, 2016). Salah satu daerah yang berpotensi besar menjadi tempat munculnya konflik semacam itu adalah Aceh Tengah.

Kabupaten Aceh Tengah, daerah yang menjadi titik rawan terjadinya konflik tersebut, yaitu Kampung Gayo Murni yang terletak di Kecamatan Atu Lintang (Sagita, 2016). Di kampung tersebut, hampir epara separuh dari jumlah penduduknya adalah orang Jawa, sehingga tidak terlepas dari pengaruh milisi yang sangat kuat. Di samping itu, orang Aceh yang jumlahnya paling sedikit dianggap sebagai penyebar ide separatismeseparatisme sehingga mendapatkan ancaman dan pengusiran yang berujung pada penculikan, pembantaian, dan pembakaran rumah.

Konflik yang ditimbulkan oleh GAM ini melibatkan suku etnis pendatang yang tinggal di Kabupaten Aceh Tengah, misalnya pada di Kampung Gayo Murni, kecamatan Atu Lintang. Tentara GAM yang ini menolak keberadaan orang-orang etnis pendatang, yaitu salah satunya orang-orang suku Jawa, karena dianggap sebagai pro pemerintah atau mata-mata pemerintah (Wiratmadinata, 2021). Keributan terjadi di atas tanah Gayo, dan melibatkan banyak pihak. Namun perlu dipahami bahwa konflik yang terjadi ini bukan didasari atas persoalan etnis, atau suku, namun akibat konflik struktural antara GAM dengan Pemerintah RI (Sagita, Dalam Paparan KKDN Prodi DRK FKN UNHAN, 2021).

Pada tahun 2005 dilakukan penandatanganan MoU Helsinki di Finlandia dan mengakhiri konflik yang sebelumnya sudah terjadi selama 30 tahun antara GAM dengan pemerintah RI. Dalam pelaksanaannya, secara umum

masyarakat Aceh, beserta pemerintahannya merasa kurang puas, karena ada 10 poin yang tidak, atau belum dipenuhi oleh pemerintah pusat. "Dari 71 Pasal MoU Helsinki, setidaknya terdapat 10 Pasal yang sampai saat ini belum terealisasi. Ada yang sudah diupayakan realisasinya oleh Pemerintah Aceh, namun terkendala di tingkat pemerintah pusat." Ucap Delky Nofrizal Qutni, direktur Yayasan Aceh Kreatif (Randi, 2019). "Isu-isu yang masih sering disorot soal peraturan pertanahan misalnya mantan kombatan GAM mau yang akan dikasih diberi 2 hektar tapi sampai sekarang belum terpenuhi, terus soal lambang dan bendera. Dalam MoU disebutkan hanya 6 hal yg jadi kewenangan RI, selebihnya kewenangan Aceh. Lalu UU No. 11 2006 berubah dari persetujuan berubah menjadi konsultasi dan pertimbangan" (Wiratmadinata, 2021).

Sebagai konsekuensi dari kesepakatan MoU Helsinki, GAM di haruskan membubarkan sayap militernya, yaitu Tentara Nanggroe Aceh (TNA) (RACHMAN, Edy, & Karim, 2009). GAM selanjutnya mendirikan sebuah organisasi baru yang diberi nama Komite Peralihan Aceh (KPA). Komite Peralihan Aceh (KPA) dibentuk untuk menjaga kendali dan sumber data atau informasi mengenai mantan GAM. Pengurusnya terdiri dari panglima-panglima GAM dari tingkat wilayah sampai kecamatan. Melalui wadah organisasi ini dimaksudkan agar mantan GAM tetap terkendali (RACHMAN, Edy, & Karim, 2009).

"Kampung Gayo Murni ini menjadi pusat transmigrasi, atau khususnya Kec. Atu lintang. Kedatangan KPA yg mayoritas gayo murni, sudah diterima orang-orang. Tapi KPA itu, mantan kombatan GAM, berperilaku tidak menyenangkan, dan menghasilkan konflik baru" (Sagita, Dalam Paparan KKDN Prodi DRK FKN UNHAN, 2021). Secara umum proses perdamaian itu

sudah merambat ke semua tempat, mangkanya didirikan KPA, Komisi (Komite) Peralihan Aceh, untuk menghilangkan jejak-jejak konflik. Konflik yang terjadi bukanlah konflik masif yang bereskalasi, hanya sekedar konflik horizontal yang terjadi pada level individu, dengan sumber konflik yang berasal atas rasa suka dan tidak suka terhadap perilaku seseorang. Pada saat ini, sejak terakhir konflik berskala cukup besar hingga 2009 lalu sudah tidak lagi ditemukan konflik yang bersifat etnis, bahkan hubungan masyarakat yang tinggal di Kampung Gayo Murni, Kecamatan Atu Lintang sudah tidak lagi membedakan mana orang Gayo, mana orang Jawa, Aceh dan sebagainya. Bahkan secara struktural kepala Desa Gayo pernah dijabat oleh orang Jawa" (Sagita, 2021).

Selain soal perjanjian damai Helsinki, masih ada pergerakan dari masyarakat Aceh yang berkaitan dengan lambang bendera daerah. Berdasarkan Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh, menetapkan bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sebagai bendera provinsi (Wahyudi, 2013). "Bendera dan lambang tersebut sudah ditetapkan oleh semua warga Aceh, pemerintah daerah dan DPR A. Semuanya sudah sepakat, jika pemerintah pusat tetap akan mengganti, kita akan referendum untuk menentukan kembali bendera dan lambang. Namun itu tidak perlu, karena mayoritas warga Aceh sudah sepakat," ujar Adnan kepada Okezone, Selasa (2/4/2013). Qanun Bendera dan Lambang Aceh disahkan DPR Aceh pada 22 Maret 2013 dengan mengadopsi simbol Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sebagai bendera dan lambang Aceh (Wahyudi, 2013).

Pada saat yang bersamaan di Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah, sekitar 1.500 orang yang bergabung dalam Gerakan Merah Putih menggelar konvoi dengan mengibarkan bendera Merah Putih (Wahyudi, 2013).

Unjuk rasa penolakan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh terus meluas. Setelah warga di Aceh Barat, Aceh Tengah, dan Langsa, giliran ribuan warga Gayo Lues berunjuk rasa menentang hal tersebut. Dalam aksi itu, massa mengibarkan bendera Merah Putih. Massa yang tergabung dalam Masyarakat Gayo Lues itu terdiri dari mahasiswa, Patriot Nasional, dan sejumlah elemen masyarakat (Wahyudi, 2013). Hal tersebut menunjukkan bahwa Aceh Tengah sebagai basis pusat perdamaian antara Aceh dengan pemerintah RI.

Demi kepentingan NKRI rakyat Gayo menyatakan akan terus menggelar aksi serupa apabila qanun tersebut tidak dibatalkan (Wahyudi, 2013). Massa mengancam menurunkan secara paksa bendera Aceh yang dikibarkan di Gayo Lues. Massa juga membakar replika bendera bulan bintang yang dibuat dari kertas karton. Aksi berakhir dengan menaikkan bendera Merah Putih di lapangan Sekolah Dasar 1 Blangkejeren disertai penghormatan dan menyanyikan lagu "Indonesia Raya" (Wahyudi, 2013).

Konflik itu adalah adanya sesuatu yang incompatible dalam masyarakat, misalnya perangkat-perangkat sosial, diskriminasi, dan intoleransi (Muluk, 2021). "Konflik yang ditakutkan orang adalah konflik yang mengundang eskalasi kekerasan yang masif. Collective memory, sejarah itu tidak hanya tercatat dalam buku sejarah, namun dalam ingatan-ingatan yang dibumbui, sehingga menjadi sumber konflik di masa depan. Penanganan paska konflik juga rawan menjadi sumber konflik" (Muluk, 2021). Apa yang terjadi di Kampung Gayo Murni memang menarik. Dalam sejarah Kampung Gayo Murni menjadi tempat berkonflik orang Aceh yang tergabung dalam GAM, dengan etnis pendatang seperti orang-orang Jawa, Minang, Tionghoa dan lain-lainnya. Konflik tersebut tentu saja berdampak

pada masyarakat, karena kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan, termasuk korban jiwa. Namun, setelah waktu berlalu, sejak terakhir konflik pada tahun 2009, hingga saat ini (hampir sepuluh, atau sebelas tahun lamanya), sudah tidak lagi terjadi konflik, bahkan kejadian di masa lalu itu nampaknya sudah dilupakan (Sagita, Dalam Paparan KKDN Prodi DRK FKN UNHAN, 2021).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian yang berjudul Optimalisasi Peran Kearifan Lokal Masyarakat Gayo dalam Membangun Perdamaian Positif di Aceh berfokus pada nilai-nilai budaya yang dimiliki masyarakat Gayo sehingga dapat digunakan untuk membangun perdamaian positif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (qualitative research) dengan model studi kasus. Creswell (2003) menjelaskan bahwa pendekatan kualitatif merupakan pendekatan untuk membangun pernyataan pengetahuan berdasarkan perspektif-konstruktif (misalnya makna-makna yang bersumber dari pengalaman individu, nilai-nilai sosial dan sejarah, dengan tujuan untuk membangun teori atau pola pengetahuan tertentu), atau berdasarkan perspektif partisipatori.

Penelitian kualitatif ini secara spesifik lebih diarahkan pada penggunaan model studi kasus. Penelitian studi kasus terdiri dari penyelidikan yang terperinci, seringkali data yang dikumpulkan pada periode waktu, fenomena dan konteks tertentu yang bertujuan untuk memberikan analisis tentang konteks dan proses yang berkaitan dengan isu teoretis yang dipelajari (Prihatsanti, Unika, & ..., 2018). Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan menggunakan wawancara mendalam dengan beberapa narasumber yang mempunyai kepentingan dan kewenangan terhadap topik penelitian. Selain itu, studi literatur juga digunakan

dalam penelitian mengingat data yang tersedia cukup banyak.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Gambaran Umum Suku Gayo**

Suku Gayo dan Alas mendiami dataran tinggi Aceh, Suku Gayo sebelah utara dan Suku Alas di sebelah selatan. Secara umum Gayo terbagi tiga definisi (Fasya & Kemal, 2018). Pertama, urang Gayo (masyarakat Gayo) atau etnis yang didefinisikan secara sosio-biologis sebagai masyarakat asli Gayo. Kedua, tanah Gayo (tanah Gayo) atau daerah yang dipahami sebagai wilayah kultural Gayo. Yang termasuk tanah kultural mereka adalah Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Aceh Timur (Lokop), Kabupaten Aceh Tenggara (Alas), Kabupaten Aceh Tamiang (Kalul), dan Kabupaten Nagan Raya (Lhok Gayo). Terakhir, basa Gayo (bahasa Gayo) atau yang menguasai bahasa Gayo. Definisi ini memperlihatkan bahwa konsep Gayo merupakan konsep yang terbuka bahkan kepada orang yang bukan asli Gayo. Hal ini menjadi salah satu yang membuat kultur Gayo menjadi begitu unik di mana mereka tidak mengenal stratifikasi sosial berbasis kelas kebangsawan dan masyarakat awam.

Suku Gayo mendiami beberapa daerah di Provinsi Aceh. Suku Gayo Lut mendiami Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah, sedangkan Gayo Alas atau Gayo Deret mendiami Kabupaten Gayo Lues dan Kabupaten Aceh Tenggara. Di daerah Aceh Timur juga terdapat Suku Gayo Lukup (Sukiman, 2015). Gayo muncul pertama kali di dalam literatur melayu Hikayat Raja-Raja Pasai. Penelitian arkeologis ini mengindikasikan bahwa masyarakat pendatang yang tinggal di Gayo adalah masyarakat asli provinsi Aceh. Ketut Wiradnyana, ketua penelitian tersebut, berpendapat bahwa pendatang tersebut adalah nenek moyang seluruh masyarakat Gayo dan kemungkinan juga

merupakan nenek moyang orang Batak di Sumatera Utara (Arfiansyah, 2020). Sebagai wilayah multikultural yang besar di Aceh, Gayo pun memiliki ciri khas dalam budaya diantaranya: tari saman Gayo.

Tari saman gayo (Wibowo, 2018) merupakan tarian yang berasal dari Aceh. Tari saman hidup dan berkembang pada kebudayaan suku Gayo baik yang berada di Lokop maupun yang berada di Blangkejeren (Gayo Lues). Dalam tarian Saman, kecepatan, ketepatan, dan kekompakan gerak antar penari adalah unsur yang sangat penting. Dibutuhkan konsentersasi tinggi untuk menyeimbangkan diri, gerakan tubuh, dan nyanyian yang akan menambah kedinamisan gerakan. Melalui semua inilah maka tari Saman dapat berkembang sampai dikenal oleh masyarakat di seluruh penjuru dunia. Jumlah penari dalam tari Saman adalah lebih dari sepuluh orang dengan syarat jumlahnya harus ganjil. Pada dasarnya tarian saman hanya dibawakan oleh laki-laki, namun kini sudah tidak asing lagi apabila dibawakan oleh perempuan. Beberapa nilai pendidikan budi pekerti dari tari saman, diantaranya: 1) Keimanan; 2) Kedisiplinan dan Ketekunan; 3) Sopan Santun; 4) Estetika.

### **Persepsi Masyarakat Gayo tentang Perdamaian**

Proses perdamaian di Aceh pasca mengalami berbagai tantangan, diantaranya datang dari generasi muda di Aceh yang malah memiliki keinginan untuk menghidupkan kembali glorifikasi GAM. "GAM terbentuk dari adanya grievens akibat ketidakadilan" (Wiratmadinata, 2021). Ketidakadilan yang dimaksud adalah yang dilakukan oleh pemerintah RI pada masa itu terhadap masyarakat Aceh. Pemilu pasca MoU Helsinki menjadikan anggota GAM menduduki pemerintahan di Aceh sehingga grievens berakhir. Hal itu justru menjadi ketidakadilan di Gayo karena

masyarakat Gayo tidak mendapat kedudukan di pemerintahan. "2008-2009 adalah puncak konflik" (Sagita, Dalam Paparan KKDN Prodi DRK FKN UNHAN, 2021). Kampung Gayo murni merupakan pusat transmigrasi orang-orang Jawa pada tahun 1980an. Pasalnya, KPA cenderung berperilaku tidak menyenangkan terhadap masyarakat Gayo murni. Begitu pun sebaliknya. Masyarakat Gayo murni tidak senang dengan GAM apalagi pasca MoU Helsinki di mana mereka banyak menduduki pemerintahan di Aceh.

"Gayo adalah benteng kedamaian di Aceh" (Wiratmadinata, 2021). Gayo berkontribusi besar terhadap kedamaian di Aceh. Hal tersebut dikarenakan budaya yang kental, multikulturalisme di yang berkembang, serta masyarakat yang cinta damai. "Ada semacam kemampuan organik di sistem budaya mereka yang tidak menjadikan potensi konflik yang ada di Gayo tidak mengalami eskalasi" (Wiratmadinata, 2021). Apabila dikaitkan dengan perdamaian yang ada di Gayo serta rendahnya konflik antar etnis yang terjadi di Tanah Gayo, maka kemampuan organik yang dimaksud salah satunya merujuk kepada kebudayaan dan adat yang berlaku di Tanah Gayo sendiri. Kebudayaan dan hukum adat yang sudah ada sejak dulu dan secara turun temurun diwariskan kepada baik suku asli Gayo maupun pendatang erat kaitannya dengan pembentukan karakter warganya. Sistem budaya masyarakat Gayo populer dengan sebutan sumang. Sistem budaya sumang Gayo ini bermuatan pengetahuan, keyakinan, nilai, aturan, dan hukum yang menjadi acuan bagi tingkah laku dalam kehidupan masyarakat Gayo. Dalam pendidikan sumang, nilai semayang/gemasih (nilai kasih sayang) merupakan ciri khas yang sangat urgent dipertahankan, diimplementasikan dan dilestarikan, dalam pembinaan karakter masyarakat

Gayo yang mulia, sejahtera, dan bermartabat (Syukri, 2017).

Perkembangan konflik vertikal antara GAM dan RI yang akhirnya menjadi konflik horizontal antara Aceh di pesisir dengan masyarakat Gayo. Saat ini konflik tersebut sudah mulai meredam, walaupun masih terjadi kecemburuan sosial yang ditunjukkan saat terpilihnya Nova Iriansyah, yang kebetulan merupakan orang Gayo, menjabat sebagai Gubernur Provinsi Aceh hingga saat ini. "Resistensinya luar biasa. Bahkan banyak beredar meme yang cenderung termasuk ke dalam bullying. Sekali lagi, hal tersebut tidak kemudian menjadi konflik besar karena budaya masyarakat Gayo yang cinta damai (Wiratmadinata, 2021). "Saat ini sudah jarang terjadi konflik etnis, hanya ada konflik-konflik personal antara beberapa masyarakat etnis tertentu yang juga tidak dipungkiri juga terjadi pada etnis di wilayah lain selain Aceh" (Sagita, 2021). Perdamaian yang sekarang terjadi merupakan hasil dari peraturan-peraturan tidak tertulis yang lama kelamaan menjadi hal yang lumrah, dan justru bukan dari peraturan pemerintah. "Ketidakadilan yang terjadi saat ini lebih cenderung dari segi politis" (Sagita, Dalam Paparan KKDN Prodi DRK FKN UNHAN, 2021). Ketidakadilan yang dimaksud berupa imbauan pemerintah Aceh yang menginginkan masyarakat Aceh bisa berbahasa Aceh.

### **Optimalisasi Peran Kearifan Lokal Masyarakat Gayo sebagai Upaya Membangun Perdamaian Positif**

Secara etimologi, kearifan lokal (local wisdom) terdiri dari dua kata yaitu kearifan (wisdom) dan lokal (local). Kearifan lokal mengacu pada berbagai nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam sebuah masyarakat yang dikenal, dipercaya, dan diakui sebagai elemen-elemen penting yang mampu mempertebal kohesi sosial di tengah masyarakat (Haba dalam

Abdullah, 2010), 2008). Adanya nilai-nilai yang ada dalam kehidupan masyarakat digunakan untuk membangun keteraturan hidup agar menjadi sistematis dan seimbang. Untuk mengupayakan keseimbangan tersebut dibutuhkan suatu sistem yaitu nilai budaya. Satu hal utama dari suatu sistem nilai budaya yaitu pemikiran, perkataan, dan perbuatan. Sejalan dengan hal tersebut, Mahatma Gandhi, seorang tokoh yang mendukung pluralisme dan universalisme menganjurkan adanya perdamaian, kerukunan, persatuan, dan persahabatan antar semua pemeluk agama. Untuk mencapai hal tersebut, Gandhi (dalam Hakim & Safina Lukma et al, 2014) menekankan ajaran-ajaran yaitu (1) ahimsa (tanpa kekerasan); (2) satyagraha (kekuatan kebenaran) yang artinya bahwa orang harus memegang tegus kepada kebenaran, sekalipun dihadapkan pada peristiwa yang membahayakan. Kejahatan harus dilawan, bukan dengan kejahatan tetapi dengan kebaikan. Dan (3) swadesi yang berarti cinta tanah air sendiri yang dilakukan dengan cara mengabdikan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya.

Dalam konteks masyarakat Gayo, dimensi kearifan lokal masyarakat Gayo terangkum dalam nilai dasar budaya yang merepresentasikan filosofi, pandangan hidup, dan karakter ideal yang ingin diraih. Melalatoa (dalam Musanna, 2011) mengemukakan tujuh nilai budaya Gayo, dimana nilai puncak merupakan representasi kearifan lokal yang berbasis nilai-nilai Islami. Sistem nilai budaya Gayo menempatkan harga diri (mukemel) sebagai nilai utama. Dalam mencapai nilai puncak tersebut, maka seseorang harus mengamalkan beberapa nilai penunjang yaitu tertip, setie, semayang gemasih, mutentu, amanah, genap-mupakat, alang-tulung. Perlu dipahami bahwa dalam mewujudkan ke tujuh nilai penunjang tersebut perlu nilai penggerak, yaitu bersikekemelen.

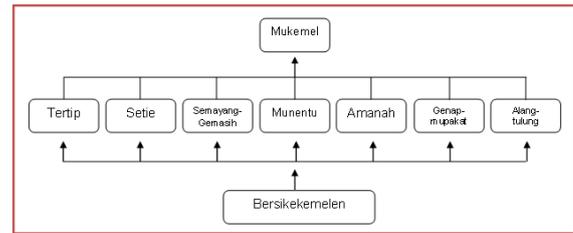


Figure 1. Nilai Budaya Gayo

Mukemel, konsep mukemel berkaitan dengan harga diri sehingga seseorang mempunyai sikap malu. Hal ini mengacu pada kemampuan seseorang untuk menjaga diri supaya tidak terjerumus pada pikiran dan perilaku yang dapat menyebabkan harga diri hilang. Seseorang yang mempunyai sikap mukemel akan dapat mempertahankan harga diri yaitu dengan menjaga diri dan keluarganya agar tidak terjebak dalam perbuatan yang bertentangan dengan tuntunan agama (syariat) dan norma kebiasaan (adat). Tertip, merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab artinya teratur atau berurutan. Dalam masyarakat Gayo, tertip berkaitan dengan sikap hati-hati sehingga perbuatan yang dilakukan tidak semena-mena. Ungkapan bahasa Gayo menyatakan “tertib bermejelis, umet bermulie” yang artinya bahwa ketertiban dalam kehidupan bersama merupakan syarat dalam mewujudkan kemuliaan.

Setie, berarti mempunyai komitmen, teguh pendirian atau setia. Kata ini mengacu pada sikap tidak mudah menyerah untuk memperjuangkan kebenaran. Dalam ungkapan Gayo berbunyi “ike jema musara ate, ungue terasa gule. Ike geremusara ate, bawal terasa bangke”, yang bermakna jika hati sudah sepakat pahit maka tantangan akan mudah diselesaikan, namun jika komitmen hilang persoalan kecilpun dapat menjadi pemicu masalah yang lebih besar. Semayang-gemasih, yang artinya kasih sayang. Konsep ini berkenaan dengan perilaku yang terpuji dalam Islam, bahkan dua nama Allah yang baik

(asmaul husna) yaitu Maha Pengasih (ar-Rahman) dan Maha Penyayang (ar-Rahim). Dalam ungkapan Gayo disebutkan, kasih enti lanih, sayang enti lelang, bermakna pentingnya mempunyai kemampuan untuk bertindak proporsional dalam berkasih sayang.

Mutentu, artinya rajin, pekerja keras, dan melakukan sesuatu sesuai dengan aturan (rapi). Konsep ini menekankan pada pembentukan sikap tidak terburu-buru atau ceroboh, tetapi berdasarkan perenungan dan perencanaan yang matang. Dalam pergaulan bermasyarakat, seseorang yang mempunyai sikap mutentu tentu akan mendapat simpati dan kepercayaan dari orang lain. Amanah, berasal dari bahasa Arab yang artinya terpercaya, jujur dan bertanggungjawab. Seseorang yang mempunyai sikap amanah akan dapat menyesuaikan antara ucapan, perbuatan, keselarasan antara idealitas dan realitas sehingga dapat bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan.

Genap-mupakat atau keramat-mupakat, berkenaan dengan perwujudan harmoni sosial. Nilai budaya genap-mupakat merupakan pengimplementasian dari prinsip musyawarah untuk mencari solusi terbaik. Masyarakat Gayo menggunakan musyawarah dalam bagian penting kehidupan untuk memutuskan persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat. Alang-tulung, artinya sikap tolong-menolong. Sebagai makhluk sosial, manusia tentu memerlukan interaksi sosial dengan orang lain sehingga tidak dapat hidup sendiri.

Untuk mewujudkan ke tujuh nilai penunjang tersebut perlu nilai penggerak, yaitu bersikekemelen. Melaltoa (dalam Musanna, 2011) mengungkapkan bahwa dengan adanya nilai bersikekemelen maka ketujuh nilai penunjang lainnya akan lebih kokoh. Prinsip berlomba-lomba dalam kebaikan (fastabiqul khairat) bertujuan untuk

meningkatkan martabat kehidupan, menghargai dan menghormati antar masyarakat.

Menurut Wiratmadinata (2021) seorang praktisi perdamaian dan resolusi konflik Aceh menyatakan bahwa:

“Gayo merupakan wilayah yang memiliki modalitas kedamaian yang besar di seluruh wilayah Aceh. Bahkan dalam kerangka lain, masyarakat Gayo dengan segala kebudayaannya sangat kental dengan kedalaman seninya dan masyarakatnya yang cinta damai yang budaya multikulturalismenya berkembang sedemikian rupa. Jika dilihat dari empat kabupaten yang ada di Aceh, masyarakat Gayo merupakan benteng perdamaian di tanah Aceh. Masyarakat Gayo merupakan masyarakat yang cinta damai, orientasi hidupnya agraris, dan memiliki kemampuan yang sangat tinggi di dalam mengelola perbedaan-perbedaan. Sebagai bukti asimilasi yang terjadi di Gayo, mereka hidup berdampingan dengan baik dengan suku Minang, suku Batak, dan suku Jawa. Jadi, karakter dari masyarakat sangat asertif, sangat akomodatif, sangat menerima penduduk baik yang datang dari Jawa, Minang, Batak, dan dari daerah lain.”

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa masyarakat Gayo merupakan masyarakat yang cinta damai, menjunjung tinggi toleransi dengan budaya lain, dan mempunyai nasionalisme yang tinggi. Sehingga, masyarakat Gayo membuat perbedaan tidak lagi dilihat sebagai hal yang memisahkan dan menimbulkan ingroup dan outgroup tetapi membuat masyarakat melihat anggota masyarakat lain yang sekalipun berbeda dengannya sebagai bagian dari satu kesatuan yang besar, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Terlebih lagi nilai-nilai budaya Gayo tidak hanya dilakoni sebatas budaya saja, tetapi sudah dijadikan upaya penyelesaian konflik

hukum pada masyarakat Gayo untuk menciptakan masalah yang berkeadilan dan kebersamaan untuk mewujudkan masyarakat aman, damai, dan bermartabat (Jamhir, 2018).

Apabila nilai-nilai budaya Gayo dianalisis dengan mendalam, maka akan ditemukan bahwa nilai-nilai budaya tersebut mengandung spirit budaya damai seperti yang didefinisikan dalam Deklarasi PBB 1998 yaitu seperangkat nilai, tradisi, dan cara berperilaku yang mampu merefleksikan: (1) adanya penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia; (2) adanya komitmen untuk menghindari konflik dan kekerasan serta adanya penolakan terhadap penggunaan cara-cara kekerasan apapun bentuk dalam menyelesaikan masalah; (3) komitmen untuk ikut serta dalam proses pemenuhan kebutuhan bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang; (4) kesetaraan gender; dan (5) respek terhadap prinsip kebebasan, toleransi, kerjasama, keadilan, keanekaragama-budaya, agama, serta etnik.

Masyarakat Gayo merupakan bagian integral dari bangsa Indonesia. Mereka mempunyai karakter dan sistem nilai budaya yang spesifik seperti masyarakat Indonesia pada umumnya. Sistem nilai budaya masyarakat Gayo yang bermuatan pengetahuan, keyakinan, nilai, agama, norma, aturan, dan hukum menjadi acuan dalam berperilaku di kehidupan dan digunakan untuk menjaga eksistensi masyarakat. Nilai-nilai budaya Gayo mencerminkan profil ideal yang diharapkan dalam membentuk orang yang dihormati dalam interaksi sosial. Dengan adanya nilai-nilai budaya masyarakat Gayo mendorong mereka untuk menjauhkan diri dari perbuatan buruk dan tidak mengikuti hawa nafsu, sehingga potensi konflik yang ada dapat diredam dan membangun perdamaian positif di Aceh.

## **SIMPULAN**

Konflik yang terjadi di Tanah Gayo merupakan konflik antara GAM dengan pemerintah RI. Suku Gayo merupakan basis perdamaian di Aceh yang mempunyai karakter masyarakat cinta damai dan penuh toleransi. Dimensi kearifan lokal masyarakat Gayo terangkum dalam nilai dasar budaya yang merepresentasikan filosofi, pandangan hidup, dan karakter ideal yang ingin diraih, sehingga menjadi acuan dalam berperilaku di kehidupan bermasyarakat. Selain itu, sistem nilai budaya tersebut mengandung spirit budaya damai seperti yang didefinisikan dalam Deklarasi PBB 1998 yaitu seperangkat nilai, tradisi, dan cara berperilaku yang mampu merefleksikan: (1) adanya penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia; (2) adanya komitmen untuk menghindari konflik dan kekerasan serta adanya penolakan terhadap penggunaan cara-cara kekerasan apapun bentuk dalam menyelesaikan masalah; (3) komitmen untuk ikut serta dalam proses pemenuhan kebutuhan bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang; (4) kesetaraan gender; dan (5) respek terhadap prinsip kebebasan, toleransi, kerjasama, keadilan, keanekaragama-budaya, agama, serta etnik. Oleh karena itu, melihat tuntutan GAM terhadap pemerintahan pusat dinilai akan menyebabkan permasalahan dan konflik yang baru di Aceh. Sehingga, yang dilakukan GAM tidak sejalan dengan sistem nilai budaya masyarakat Gayo. Oleh karena itu saran kami dalam tulisan ini adalah,

1. Masyarakat Gayo mempunyai sistem nilai budaya yang mengadung spirit budaya damai dalam Deklarasi PBB 1988 sehingga perlu adanya komitmen pemerintah untuk melestarikan nilai budaya sebagai salah satu prioritas

kebijakan yang layak diapresiasi.

2. Dalam mengambil kebijakan di Pemerintah Aceh perlu memberi ruang yang lebih luas kepada semua pihak masyarakat sehingga tidak menimbulkan kecemburuan sosial.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, I. (2010). *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*. Indonesia: Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ananta, A. (2007). *The Population and Conflict Aceh*. ISEAS, 22.
- Arfiansyah. (2020). Islam dan Budaya Masyarakat Gayo, Provinsi Aceh: Kajian Sejarah dan Sosial. *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia* Vol. 1, No. 1, 1-31.
- BPS. (2021). Hasil Sensus Penduduk 2020. *Berita Resmi Statistik*, 1-16.
- Creswell, J. W. (2003). *Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Thousand Oaks: Sage.
- Fasya, & Kemal, T. (2018). Egalitarianisme Gayo: Sebuah Inisiatif Antropologi Sosial dan Etnografi Politik. *Aceh Anthropological Journal*, Vol. 2, No. 2, 4-5.
- Hakim, Lukma, S., & ... (2014). Pemikiran Mahatma Gandhi Tentang Nilai-Nilai Kemanusiaan. *Artikel Ilmiah Mahasiswa*. Volume 1 Nomor 1, 1-10.
- Jamhir. (2018). Nilai-nilai Adat Gayo Bersandarkan Hukum Islam Sebagai Pedoman dalam Menyelesaikan Kasus Hukum Pada Masyarakat Gayo. Diakses melalui [jurnal.ar-raniry.ac.id](http://jurnal.ar-raniry.ac.id).
- Mengingatnkan - Sejarah dan Kebudayaan Suku Gayo Aceh. (2019, November 1). Dipetik Maret 27, 2021, dari [joernalinakor.com/mengingatnkan-sejarah-dan-kebudayaan-suku-gayo-aceh/](http://joernalinakor.com/mengingatnkan-sejarah-dan-kebudayaan-suku-gayo-aceh/)
- Muluk, H. (2021). *Social Conflict*. Dalam *Paparan KKLN Prodi DRK FKN UNHAN*.
- Musanna, A. (2011). Rasionalitas dan Aktualitas Kearifan Lokal sebagai Basis Pendidikan Karakter. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*. Volume 17 Nomor 6, 588-598.
- Nurdin. (2019, Juni 24). Provinsi Aceh terdiri dari 23 Kabupaten, 13 suku dan memiliki 11 bahasa daerah. *Indonesiana Platform Kebudayaan*: <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbaceh/provinsi-aceh-terdiri-dari-23-kabupaten-13-suku-dan-memiliki-11-bahasa-daerah/#:~:text=Di%20Aceh%20terdapat%2013%20suku,daerah%20Aceh%20adalah%20baha%20Aceh>.
- Prihatsanti, Unika, & ... (2018). Menggunakan Studi Kasus sebagai Metode Ilmiah dalam Psikologi. *Buletin Psikologi*. Volume 26 Nomor 2, 126-136.
- RACHMAN, Edy, S., & Karim, A. G. (2009). Komite peralihan Aceh (KPA) transformasi gerakan politik pasca perjanjian damai Helsinki: Studi kasus mobilisasi sumber daya KPA dalam pilkada Kota Lhokseumawe. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Randi, D. (2019, Juni 13). YAK: Ada 10 Butir-butir MoU Helsinki yang Belum Terealisasi. *Kanal Aceh*: <https://www.kanalaceh.com/2019/06/13/yak-ada-10-butir-butir-mou-helsinki-yang-belum-teralisasi/>
- Sagita, N. W. (2016). Konflik Antar Etnis di Tanah Gayo: Tinjauan Interaksi Sosial Antar Etnis Jawa dan Etnis Aceh Tahun 1989-2015. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 59-79.
- Sagita, N. W. (2021, Maret 24). Dalam *Paparan KKDN Prodi DRK FKN UNHAN*. (G. D. Setiyatwan, Pewawancara)
- Sukiman. (2015). Pengaruh Modernisasi Terhadap Tradisi Pendidikan Anak Dalam Masyarakat Suku Gayo. *el Harakah* Vol.17 No.2, 275-287.
- Syukri. (2017). Budaya Sumang Dan Implementasinya Terhadap Restorasi Karakter Masyarakat Gayo Di Aceh. *MIQOT*, 406-422.
- Wahyudi, B. (2013). *RESOLUSI KONFLIK ACEH*, Kiprah Masyarakat Aceh. Jakarta: CV Makmur Cahaya Ilmu.
- Wibowo, G. A. (2018). Nilai Pendidikan Budi Pekerti Dalam Seni Tari Saman. *Seuneubok*

**Gani Dwisatria Setiyatwan, Endro Legowo, Bambang Wahyudi**

*Optimalisasi Peran Kearifan Lokal Masyarakat Gayo Dalam Membangun Perdamaian.....(Hal 3201-3211)*

Lada: Jurnal Ilmu-ilmu Sejarah, Sosial, Budaya dan Kependidikan, 5(1), 177-182.

Wiratmadinata. (2021, Maret 24).  
Dalam Paparan KKDN Prodi DRK FKN UNHAN  
2021. (G. D. Setiyatwan, Pewawancara).